

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aermadepa, et.al., 2024, *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya, Jakad Media Publishing.
- Ayu Widowati Johannes, 2020, *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*, Bandung, Cendikia Press.
- Budi Juliardi, dkk., 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Padang, Gita Lentera.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Hans Kelsen, 2019, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Yogyakarta, Nusamedia.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media.
- Kasman Bakry, Apriyanto, dan Efraim Mangaluk, 2025, *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish.
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Martien Herna Susanti, 2017, *Otonomi Daerah*, Bantul, Magnum Pustaka.
- Otto Gusti Ndegong Madung, 2014, *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Maumere, Penerbit Ledalero.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenada Media.
- Saldi Isra, 2009, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi: Catatan Hukum*, Jakarta, Kompas.

Zainal Arifin Hoesein, 2023, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

C. Jurnal dan Skripsi

Adita Haafizhoh, Az Zahra Fariza, dan Hanny Luthfiywh Afidi, 2024, Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pada Sengketa Hasil Pemilihan Umum 2024, *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2

Abra Emy Hajar, 2024, Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Riau

Adriansyah Faizal, 2025, Efektivitas Penerapan Pasal Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Pejabat Publik, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Akbar Muhammad, Hambali Thalib, dan Sri Lestari Poernomo, 2024, Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 5, No. 2

A. Munawar dan M. Iqbal Syam, 2022, Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Serta pada Pemilu 2019 dalam Dimensi Hak Asasi Manusia, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1

- Anjeli Azimatu, 2024, Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi Atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum), *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia
- Antari Putu Eva Ditayani, 2018, Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Balubun Wellem Hendra dan Inosensius Oscar Yeuyanan, 2024, Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana, *Patriot*, Vol. 2, No. 1
- Botutihe Darwin, 2024, Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana), *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia
- Fadli Khoirul Ihwan Nur, 2023, Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara
- Haafizhoh Adita, Az Zahra Fariza, dan Hanny Luthfiywh Afdi, 2024, Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pada Sengketa Hasil Pemilihan Umum 2024, *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2
- Hamzah Nasution, 2018, Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif, *Skripsi*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara
- Herdianto Lepak, 2024, Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Juwita Rahayu Manurung dan Irwansyah, 2023, Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Jurnal EDUCATIO*, Vol. 9, No. 1
- Kelilauw Amran Anshary dan Zuhad Aji Firmantoro, 2024, Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 2
- Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, dan Adissya Mega Christia, 2020, Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3
- Maikel Alfonda, 2025, Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial Terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- Mia Gisella Kartika Pasaribu, 2025, Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam Freedom of Speech, *Honeste Vivere*, Vol. 35, No. 1
- Muh. Daffa Chalik Haykal, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana dalam Peserta Pemilihan Anggota DPD, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin
- Muhammad Anwar dan Retno Saraswati, 2018, Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2
- Muhammad Fahrur Razi, 2025, Analisis Putusan MK Nomor 65/XXI-PUU/2023, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2
- Muhammad Suhada, Joko Widarto, Markoni, dan Achmad Edi Subiyanto, 2024, Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 56/PUU-XXI/2023, *Al-Mikraj*, Vol. 5, No. 1
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, 2022, Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1
- Nissy Asandrum Siallagan dan Besty Habeahan, 2024, Tanggung Jawab Hukum Pihak Penjual Atas Penjualan Properti Tanpa Persetujuan Pemilik, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6
- Noffilla Rahma Anindi, 2023, Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau dari Putusan MA Nomor 46 P/Hum/2018, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2, No. 1
- Nurwigati, 2022, Rekonstruksi Putusan MK Berkenaan Dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia
- Padan Batari Siregar, 2025, Peran MK dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan, *Al Yasini: Jurnal Keislaman Sosial Hukum dan Pendidikan*, Vol. 10, No. 6
- Putra Didit, 2019, Penyesuaian Diri Mantan Narapidana di Masyarakat, *Skripsi*, IAIN Bengkulu
- Rauf, Aliksan, Muhamad Aljebra, dan Rudini Hasyim Rado, 2022, Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode, *Al-Adalah*, Vol. 7, No. 2
- Rifqi Ahmad Nawawi, 2020, Tinjauan Yuridis Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Safa'i M. Tegar, M. Riziq, Revydo Eky Pratama, Rezky Ayu Amelia, dan Nabilah Dwi Rakhmawati, 2024, Problematika Hak Politik Bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif 2024, *Sosio Yustisia*, Vol. 4, No. 2

Salsah Dila dan Syofiaty Lubis, 2023, Legal Reasoning Hakim MK dalam Memutuskan Syarat Jeda Mantan Terpidana Untuk Ikut Pilkada, *Jurnal EDUCATIO*, Vol. 9, No. 2

Sania Nabila, 2025, Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah, *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 5, No. 1

Tazkir Harun Al-Rasyid Lating, 2024, Proporsional Keanggotaan DPD Terhadap Pemakzulan Presiden, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tengku Erwinsyahbana, 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas, *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2

Utama Muhammad Rozaq Wira, 2024, Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Siyasah Qadhaiyah, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim

Zamasi Hiburan, 2024, Analisis Hukum Penerapan Putusan Bebas Terhadap Kasus Pemalsuan Surat, *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Internet/Website

Admin, "Arti Kata Hukum", <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

Admin, "Arti Kata Pertanggungjawaban", <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

Utami Argawati, "Belum Penuhi Masa Jeda, Amrullah S. Kasim Almahdaly Dicoret dari Pilbup Parigi Moutong", [, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23004#:~:text=)